



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 17570-17583

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Diplomasi Kolaboratif Anggota Asean dalam Sengketa Maritim di Kawasan Laut Cina Selatan

Dzikra Zhafira Putri^{1✉}, Maulana Rifai², Prilla Marsingga³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631260028@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menggali dan menganalisis ketegangan yang berlangsung terus-menerus di Laut Cina Selatan serta kompleksitas konflik yang melibatkan negara-negara di kawasan tersebut. Fokus utamanya ditujukan pada peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani sengketa tersebut, dengan menekankan tanggung jawabnya sebagai mediator dan fasilitator dialog. Dampak regional dari ketegangan ini, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara, menjadi fokus utama artikel ini dengan penekanan pada upaya ASEAN dalam menangani situasi tersebut. Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dari jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan sengketa maritim, klaim wilayah, dan peran ASEAN. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung, melainkan mengandalkan data yang diperoleh melalui analisis literatur yang komprehensif. Artikel juga menyoroti upaya diplomasi kolaboratif ASEAN dalam menyelesaikan konflik dengan menggunakan mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF), "ASEAN Way," dan "Treaty of Amity and Cooperation" (TAC).

Kata Kunci: : *Diplomasi Kolaboratif, ASEAN, Laut Cina Selatan*

Abstract

This research delves into and analyzes the ongoing tensions in the South China Sea and the complexity of conflicts involving countries in the region. The primary focus is on the role of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as a regional organization in addressing these disputes, emphasizing its responsibilities as a mediator and facilitator of dialogue. The regional impact of these tensions, especially for Southeast Asian countries, is the main focus of this article with an emphasis on ASEAN's efforts in managing the situation. The research methodology adopts a qualitative approach with a literature analysis from relevant journals and scholarly articles on maritime disputes, territorial claims, and the role of ASEAN. The study does not involve direct interviews but relies on data obtained through comprehensive literature analysis. The article also highlights ASEAN's collaborative diplomacy efforts in resolving the conflict, utilizing mechanisms such as the ASEAN Regional Forum (ARF), "ASEAN Way," and the "Treaty of Amity and Cooperation" (TAC).

Keywords: *Collaborative Diplomacy, ASEAN, South China Sea*

PENDAHULUAN

Secara prinsip, interaksi antarnegara atau antara negara-negara dalam kerangka organisasi internasional tidak selalu berlangsung secara harmonis. Timbulnya konflik di antara pihak yang terlibat menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam dinamika hubungan internasional (Adi, 2020). Hingga saat ini, perselisihan terkait perolehan wilayah di salah satu daerah paling strategis di dunia masih terus menjadi sorotan utama. Daerah yang dimaksud adalah Laut Cina Selatan, yang dianggap sebagai perairan kaya sumber daya alam. Keberadaan gas alam dan minyak bumi di dalamnya menjadikannya sebagai jalur vital untuk kegiatan pelayaran, perdagangan internasional, dan pasokan minyak dunia (Djuyandi et al., 2021). Selain itu, Laut Cina Selatan adalah wilayah yang kaya sumber daya hidrokarbon. Survei Geologi Amerika Serikat (United States Geological Survey) memproyeksikan bahwa sekitar 60% dari sumber daya hidrokarbon, terutama gas alam, dapat ditemukan di wilayah tersebut (Ambarwati et al., 2023).

Konflik tersebut merupakan hasil dari ketegangan yang timbul akibat klaim kepemilikan yang saling bertentangan antara negara-negara yang terlibat. Kawasan Laut Cina Selatan menjadi subjek perselisihan antara Cina, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Kesemua negara tersebut mengklaim sebagian atau bahkan keseluruhan wilayah Laut Cina Selatan (Sahasrad, 2015). Laut Cina Selatan adalah suatu wilayah perairan yang mencakup dua pulau besar, yaitu Spratly dan Paracel. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, menjadi koridor laut vital dalam perdagangan dan pelayaran internasional. Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran sibuk di dunia, yang terdiri dari Sea Lines of Communication dan Sea Line Trades, menghubungkan Samudra Hindia dan

Samudra Pasifik (Rimapradesi et al., 2023). Peningkatan ketegangan konflik muncul ketika pemerintah Cina secara tegas menegaskan klaim kepemilikan terhadap Laut Cina Selatan melalui pembentukan "Nine Dash Line." Garis tersebut memberikan Cina kontrol maritim yang luas di wilayah laut tersebut, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur klaim wilayah. "Nine Dash Line" pertama kali muncul pada tahun 1947 dan terdiri dari sembilan titik atau garis putus-putus yang dijadikan dasar oleh Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Klaim ini menciptakan ketidaksetujuan dan konflik dengan negara-negara tetangga di kawasan, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, yang juga memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Sengketa terkait kepemilikan wilayah laut tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam dinamika hubungan internasional di kawasan tersebut. Kehadiran "Nine Dash Line" mencerminkan sifat ambisius dan kontroversial dalam upaya Cina untuk menguasai sumber daya alam, jalur perdagangan, dan keamanan maritim di Laut Cina Selatan, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur batas-batas wilayah laut antarnegara. (Aulawi & Edwina, 2023).

Pentingnya Kepulauan Spratly juga disebabkan oleh keberadaan 30 pulau yang membentang di area seluas 15.000 kilometer persegi. Keberagaman geografis ini mencakup sejumlah pulau, menggambarkan kompleksitas tata letak wilayah ini. Selain memberikan pengaruh pada aspek keamanan dan kebijakan militer, keberadaan pulau-pulau ini juga memiliki dampak langsung pada ekosistem laut di sekitarnya. Dengan demikian, kendali atas Kepulauan Spratly bukan hanya tentang kepentingan geopolitik dan ekonomi, tetapi juga tentang preservasi lingkungan laut yang kaya (Ambarwati et al., 2023). Dinamika di Laut Cina Selatan mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan tersebut, baik dalam konteks keamanan maupun pelestarian sumber daya alam. Klaim yang dinyatakan oleh negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan seringkali melanggar prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum laut internasional. Ketegangan yang melibatkan sejumlah negara tersebut seringkali berakhir dengan konflik, terutama terkait penentuan hak klaim atas pulau-pulau dan perairan di Laut Cina Selatan, yang melibatkan negara Cina dan anggota-anggota ASEAN. Sebagai contoh, terjadi ketegangan antara Cina dan Filipina pada tahun 1997. Konflik perselisihan semakin meningkat pada tahun 2014, khususnya pada bulan Mei, ketika kapal pengeboran minyak Cina, yakni HYSY 981, melakukan operasi di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen Vietnam (Ambarwati et al., 2023). Pada tahun 2023 bahwa ketegangan antara penjaga pantai Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan terus berulang di mana penjaga

dari Pantai Cina menembakkan meriam ke kapal-kapal yang dimiliki Filipina di jalur perairan yang disengketakan (DW, 2023).

Dampak dari ketegangan yang kerap kali terjadi di Laut Cina Selatan memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Situasi ini seringkali menimbulkan pengaruh dan dampak yang dirasakan oleh negara-negara tetangga. Dalam konteks ini, ASEAN sebagai organisasi regional yang mewadahi negara-negara di Asia Tenggara memiliki tanggung jawab untuk menjadi perantara antara negara-negara anggotanya dan Cina guna menyelesaikan konflik yang berkembang di Laut Cina Selatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik di Laut Cina Selatan dapat terus berlanjut dan tidak dapat terselesaikan, yang pada gilirannya dapat memunculkan ancaman perluasan konflik di wilayah tersebut. Meskipun ASEAN berfungsi sebagai organisasi regional yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara, kerjasama ekonomi dengan Cina juga menjadi aspek penting dalam dinamika regional. Dalam konteks ini, ASEAN memiliki peluang untuk menjadi pemain kunci dalam membentuk kebijakan regional yang mengarah pada perdamaian dan kerjasama yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan diplomasi, negosiasi, dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, diharapkan ASEAN dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mengatasi konflik di Laut Cina Selatan dan menjaga stabilitas regional di Asia Tenggara. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan perlu diupayakan melalui jalur diplomasi yang melibatkan kerjasama dan kolaborasi dari negara-negara anggota ASEAN. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan, mempertahankan keamanan regional, dan memfasilitasi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara ASEAN dan Cina (Kusumah, 2018).

Adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis ketegangan yang terus berlanjut di Laut Cina Selatan, menyoroti kompleksitas konflik yang melibatkan negara-negara di kawasan. Fokus utama ditujukan pada peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani sengketa tersebut, dengan penekanan pada tanggung jawabnya sebagai mediator dan fasilitator dialog. Artikel juga membahas dampak konflik terhadap stabilitas regional, khususnya terkait potensi sumber daya alam di Laut Cina Selatan, seperti hidrokarbon dan kekayaan maritim. Dampak regional dari ketegangan ini, terutama bagi negara-negara di Asia Tenggara, menjadi fokus artikel ini dengan penekanan pada upaya ASEAN dalam menangani situasi ini. Pembahasan mencakup upaya penyelesaian melalui diplomasi kolaboratif, dengan menjelaskan peran ASEAN dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Artikel ini juga menyoroti pentingnya diplomasi dan kerjasama regional untuk mencapai solusi berkelanjutan dan

mempertahankan stabilitas di kawasan. Terakhir, penulisan ini berusaha memberikan pemahaman mendalam tentang tren dan kejadian terkini dalam konflik, termasuk insiden-insiden baru, klaim wilayah terbaru, dan dinamika hubungan antara negara-negara yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami sengketa maritim di Laut Cina Selatan dan upaya kolaboratif ASEAN dalam menangani konflik tersebut. Pertama-tama, langkah awal melibatkan pemilihan sumber literatur dari jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan sengketa maritim, klaim wilayah, dan peran ASEAN. Pemilihan sumber didasarkan pada kredibilitas, relevansi, dan kontribusi terhadap pemahaman konflik. Selanjutnya, analisis mendalam terhadap literatur dilakukan untuk memahami akar konflik, dinamika hubungan antarnegara, dan dampaknya terhadap stabilitas regional. Fokus utama adalah pada konsep diplomasi kolaboratif dan peran ASEAN dalam menyelesaikan sengketa. Selanjutnya, identifikasi konsep-konsep kunci seperti klaim wilayah, diplomasi kolaboratif, dan dampak ketegangan di Laut Cina Selatan dilakukan, dengan pembentukan kerangka konseptual untuk mendukung analisis. Pengembangan analisis tematis menjadi langkah berikutnya, di mana pola umum, hubungan sebab-akibat, dan peran ASEAN dalam menangani sengketa diidentifikasi secara mendalam.

Penelitian ini juga menarik kesimpulan berdasarkan temuan dari analisis literatur, sekaligus mengidentifikasi implikasi potensial dari upaya kolaboratif ASEAN terhadap stabilitas regional. Perlu ditekankan bahwa penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung, melainkan mengandalkan data yang diperoleh melalui analisis literatur yang komprehensif. Dengan fokus pada literatur berkualitas tinggi, metodologi ini diharapkan dapat menyajikan analisis kualitatif yang mendalam dan menyeluruh terkait dinamika sengketa maritim di Laut Cina Selatan dan peran ASEAN dalam menanggulangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Asia Tenggara

Laut Cina Selatan, sebagai salah satu wilayah perairan strategis di dunia, telah menjadi pusat perhatian global karena sengketa maritim yang berkepanjangan antara negara-negara di kawasan tersebut. Konflik terkait klaim wilayah di Laut Cina Selatan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas regional, khususnya di Asia Tenggara. Keberadaan Laut Cina Selatan sebagai jalur pelayaran vital dan kaya sumber daya alam

telah menjadikannya sebagai subjek perselisihan antara beberapa negara, termasuk Cina, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Dampak konflik tersebut tidak hanya terbatas pada dimensi politik dan keamanan, tetapi juga merambah aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perkembangan ketegangan di Laut Cina Selatan telah menciptakan ketidakpastian dalam dinamika hubungan internasional di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana konflik di Laut Cina Selatan memengaruhi negara-negara di sekitarnya, terutama anggota ASEAN, yang memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas regional.

Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap militer dan sipil di Asia Tenggara sangat kompleks. Secara militer, ketegangan tersebut dapat memicu peningkatan anggaran pertahanan untuk memperkuat kemampuan militer sebagai respons terhadap ketegangan di Laut Cina Selatan. Hal ini berpotensi mengakibatkan realokasi sumber daya dari sektor-sektor ekonomi dan sosial ke sektor pertahanan. Eskalasi konflik juga dapat mendorong peningkatan kesiapsiagaan militer, termasuk penempatan pasukan tambahan dan peningkatan peralatan militer. Selain itu, konflik dapat memicu upaya untuk meningkatkan kerjasama militer regional antara negara-negara di Asia Tenggara, melibatkan latihan bersama, pertukaran intelijen, dan pembentukan aliansi pertahanan.

Kerusakan infrastruktur sipil, seperti jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, dapat terjadi akibat aksi militer dan ketegangan. Hal ini dapat menghambat akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur vital, sementara gangguan dalam penyediaan layanan publik seperti listrik, air bersih, dan transportasi dapat terjadi sebagai akibat dari infrastruktur yang rusak. Selain dampak pada tingkat nasional, konflik di Laut Cina Selatan juga menciptakan ketidakstabilan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat menimbulkan reaksi dari negara-negara di luar kawasan dan memiliki dampak yang lebih luas pada dinamika geopolitik. Selain itu, ketegangan di kawasan tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko ancaman terhadap keamanan global, terutama jika melibatkan kekuatan besar di luar wilayah tersebut. Warga sipil yang tinggal dekat dengan zona konflik Laut Cina Selatan juga merasakan dampaknya. Misalnya, nelayan yang beroperasi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat menghadapi ketegangan ketika berpapasan dengan patroli militer dari negara-negara yang terlibat dalam konflik. Situasi ini dapat menyebabkan zona tersebut menjadi daerah konflik, dengan konsekuensi berpotensi buruk seperti pengusiran penduduk setempat dari daerah tersebut (Djuyandi et al., 2021).

Sebagai suatu wilayah yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan ekonomi, Laut Cina Selatan berperan sebagai gerbang utama bagi industri logistik dunia dan menjadi sub-wilayah ekonomi yang krusial di kawasan Indo-Pasifik. Dari segi militer, penguasaan

Laut Cina Selatan memberikan Tiongkok peluang untuk membangun dan mengembangkan pangkalan militer. Dampak konflik di Laut Cina Selatan terhadap negara-negara anggota ASEAN mencakup berbagai aspek ekonomi yang sangat penting. Spanjang ketegangan dan pertikaian di kawasan tersebut, kemungkinan terganggunya jalur perdagangan laut dapat merugikan kegiatan ekspor dan impor negara-negara ASEAN, yang sangat bergantung pada kelancaran arus perdagangan. Selain itu, penurunan kepercayaan investor asing dapat terjadi akibat ketidakpastian politik dan keamanan, yang berdampak pada aliran investasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Negara-negara ASEAN juga dapat dihadapkan pada peningkatan anggaran keamanan dan pertahanan sebagai respons terhadap ketegangan, yang mungkin mengakibatkan realokasi dana dari sektor-sektor pembangunan ekonomi. Ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi pasar keuangan, fluktuasi mata uang, dan penghambatan proyek infrastruktur juga dapat menjadi dampak tambahan yang merugikan bagi perkembangan ekonomi di kawasan. Selain itu, konflik dapat meningkatkan harga energi karena Laut Cina Selatan memiliki peranan penting dalam perdagangan minyak dan gas global. Sektor pariwisata juga dapat terdampak karena ketidakpastian keamanan dapat merugikan industri ini, mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan dan berdampak pada pendapatan serta lapangan pekerjaan terkait. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait dampak ekonomi ini menjadi kunci penting bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam mencari solusi damai, meredakan ketegangan, dan mempromosikan stabilitas guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan tersebut (Sendow, 2023).

Konflik di Laut Cina Selatan tidak hanya berdampak pada sektor politik, militer, dan ekonomi, melainkan juga menimbulkan dampak serius pada lingkungan. Para pihak yang terlibat dalam persaingan untuk dominasi regional cenderung mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Eskalasi konflik tersebut semakin memperburuk masalah lingkungan, terutama sejak tahun 2013, ketika lima negara saling tumpang tindih dalam klaim wilayah Laut Cina Selatan, dengan Tiongkok memimpin upaya untuk membangun pulau buatan guna mengukuhkan kedaulatannya. Sayangnya, proses yang digunakan oleh Tiongkok dinilai merugikan lingkungan. Konflik ini juga mendorong negara-negara yang terlibat untuk memperkuat klaim teritorial mereka dengan meningkatkan kegiatan penangkapan ikan, menyebabkan tekanan ekstra terhadap ekosistem laut. Militerisasi yang dilakukan oleh Cina turut berkontribusi pada polusi udara dan air di wilayah tersebut. Dampaknya tidak berhenti di situ, karena konflik juga mendorong negara-negara yang bersengketa untuk melakukan pengeboran hidrokarbon, yang dapat memiliki dampak serius pada ekosistem laut yang rapuh. Oleh karena itu, konflik di Laut Cina Selatan tidak

hanya merugikan hubungan antarnegara dan ketahanan ekonomi, melainkan juga mengancam keberlanjutan lingkungan, menuntut solusi yang holistik dan berkelanjutan (Georgetown, 2018).

Diplomasi Kolaboratif ASEAN dalam Penyelesaian Konflik

Dalam dinamika hubungan internasional, perselisihan dan konflik antara negara-negara menjadi suatu kenyataan yang tak terhindarkan. Penyelesaiannya dapat melalui Diplomasi Diplomasi adalah suatu proses atau praktik yang melibatkan negosiasi, dialog, dan interaksi antara pihak-pihak yang mewakili entitas politik, seperti negara-negara atau organisasi internasional. Tujuan dari diplomasi adalah untuk mencapai kesepakatan, mempromosikan kepentingan nasional atau internasional, mencegah konflik, dan membangun hubungan yang baik antara berbagai pihak. Dalam konteks hubungan internasional, diplomasi dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti pertemuan diplomatik, perundingan, penandatanganan perjanjian, dan penyampaian pesan resmi antara pihak-pihak yang terlibat. Diplomasi seringkali merupakan cara damai untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik, meskipun tidak selalu terbatas pada situasi konflik saja (Nurika, 2017).

Salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian dalam konteks ini adalah Laut Cina Selatan. Kawasan tersebut, kaya akan sumber daya alam dan strategis dalam perdagangan internasional, telah menjadi saksi ketegangan dan perselisihan antara beberapa negara, termasuk Cina, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Ketegangan ini, khususnya terkait klaim wilayah dan kepemilikan, membuka peluang bagi diplomasi kolaboratif sebagai sarana penyelesaian konflik. ASEAN, sebagai organisasi regional yang menghimpun negara-negara di Asia Tenggara, memegang peranan kunci dalam upaya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Dengan prinsip dasar ketidakcampuran dan dialog, ASEAN memiliki potensi untuk membentuk landasan kerjasama antarnegara di kawasan. Peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan memberikan tantangan signifikan bagi ASEAN untuk menjadi mediator yang efektif dan memainkan peran penting dalam meredakan konflik serta mempromosikan stabilitas regional. Melalui pendekatan diplomasi kolaboratif, ASEAN dapat memberikan kontribusi penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan, mempertahankan perdamaian, dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan (Muhamad, 2020).

Dalam upaya menangani konflik di Laut Cina Selatan, ASEAN telah menerapkan berbagai strategi diplomasi, salah satunya melalui diskusi dan konsultasi. Mekanisme diplomasi yang dijalankan oleh ASEAN termasuk pelaksanaan ASEAN Regional Forum

(ARF), sebuah platform yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan Cina, yang dianggap kunci dalam penyelesaian sengketa tersebut. ASEAN Regional Forum (ARF) menjadi forum yang didirikan oleh negara-negara ASEAN untuk menjaga keamanan daripada kawasan serta mencegah terjadinya ketidakstabilan keamanan di kawasan. ARF berkomitmen untuk ck Diskusi dalam pertemuan awal ARF membahas isu-isu yang dianggap sensitif dalam sengketa tersebut, dengan harapan bahwa melalui ARF, Cina dapat turut serta dalam menciptakan saling kepercayaan. Tujuannya adalah agar masalah keamanan yang menjadi inti konflik dapat diatasi bersama. ARF sendiri merupakan bagian dari diplomasi jalur satu, di mana diskusi dan negosiasi formal dilakukan melibatkan negara-negara sebagai pemain utama. Pendekatan ini mencerminkan komitmen ASEAN untuk mengatasi ketegangan melalui dialog dan kerjasama aktif dengan Cina (Kusumah, 2018).

Diplomasi Track One merujuk pada kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat resmi suatu negara secara langsung dalam rangka menyelesaikan konflik atau mencapai kesepakatan politik. Ini melibatkan perundingan dan dialog antara pejabat pemerintah atau diplomat tingkat tinggi dari negara-negara yang terlibat. Diplomasi Track One biasanya terjadi di forum resmi, seperti pertemuan antara kepala negara atau perundingan formal di tingkat tinggi (Mujiono & Alexandra, 2019).

ASEAN Regional Forum (ARF) memegang peranan krusial dalam upaya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan melalui sejumlah mekanisme dan pendekatan diplomasi. Sebagai forum regional, ARF berfungsi sebagai platform dialog dan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. ARF memiliki total 27 anggota yang terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kelompok kedua terdiri dari 10 mitra wicara ASEAN, yang melibatkan Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, dan Amerika Serikat. Selain itu, terdapat lima anggota tambahan, yaitu Bangladesh, Republik Demokratik Rakyat Korea, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, dan Timor-Leste. Terakhir, terdapat satu pengamat ASEAN, yaitu Papua Nugini. Dengan anggota yang berasal dari berbagai wilayah, ARF menciptakan forum dialog yang inklusif dan luas untuk membahas isu-isu keamanan regional.

Dalam kerangka dialog dan konsultasi, ARF menyediakan wadah bagi negara-negara peserta, termasuk Cina, untuk saling berdialog dan berdiskusi, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama serta membangun kepercayaan di antara mereka. Dalam proses ini, isu-isu sensitif terkait sengketa Laut Cina Selatan dapat diangkat dan diperdebatkan secara terbuka. ARF juga berusaha untuk mendorong partisipasi aktif Cina dalam mencari solusi

terhadap konflik tersebut. Dengan melibatkan Cina dalam dialog dan kerjasama multilateral, ARF berharap dapat membujuk serta melibatkan negara tersebut dalam upaya bersama penyelesaian sengketa. Selain itu, ARF memfokuskan pada pembangunan kepercayaan di antara negara-negara peserta. Melalui pertemuan dan kegiatan lainnya, upaya pembangunan kepercayaan dilakukan untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan saling pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat. ARF menciptakan kesempatan untuk kolaborasi dalam keamanan regional, termasuk penanganan ancaman nontradisional yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, ARF berkontribusi pada penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Tak hanya itu, ARF juga memiliki peran dalam membentuk mekanisme pencegahan krisis dan manajemen konflik. Ini melibatkan perbincangan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah eskalasi konflik di Laut Cina Selatan dan menanggapi cepat terhadap situasi krisis (Sitompul, 2022).

ASEAN Way menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat informal. ASEAN Way adalah pendekatan yang mendasari dinamika hubungan antara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Konsep ini menekankan prinsip-prinsip seperti konsensus, non-intervensi, dialog, dan diplomasi sebagai landasan utama dalam menjalankan kerjasama di antara negara-negara anggota. Keputusan dalam ASEAN diambil melalui kesepakatan bersama, mencerminkan semangat solidaritas dan kesatuan di antara anggota. Prinsip non-intervensi menekankan penghormatan terhadap kedaulatan politik dan kebijakan dalam negeri masing-masing anggota tanpa campur tangan eksternal. Salah satu tujuan utama ASEAN Way adalah mencegah konfrontasi dan mengatasi ketidaksepahaman melalui dialog daripada konflik (Darmawan & Kuncoro, 2019).

Diplomasi ASEAN Way memainkan peran sentral dalam upaya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Pendekatan ini, yang diadopsi oleh Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), menekankan prinsip-prinsip konsensus, dialog, dan non-intervensi sebagai landasan bagi kerjasama antarnegara anggota. Salah satu ciri khas ASEAN Way adalah penekanan pada pembentukan konsensus di antara negara-negara anggota. Dalam konteks konflik Laut Cina Selatan, ASEAN menggunakan platform ini untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara negara-negara yang terlibat, termasuk Cina. Pencapaian kesepakatan melalui konsensus memungkinkan setiap negara memiliki peran dalam pembuatan keputusan, menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap solusi yang dihasilkan. Prinsip dialog juga menjadi bagian integral dari ASEAN Way. ASEAN menyelenggarakan pertemuan dan forum, seperti ASEAN Regional Forum (ARF), di mana negara-negara dapat berbicara secara terbuka dan saling memahami. Dialog ini bertujuan

untuk membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait kepentingan dan kekhawatiran masing-masing. Konsep non-intervensi dalam ASEAN Way menciptakan lingkungan di mana negara-negara anggota menghormati kedaulatan politik dan kebijakan dalam negeri masing-masing. Ini membantu mengurangi potensi interferensi eksternal dalam penyelesaian konflik dan memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota untuk menjalankan diplomasi sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN. Dalam konteks konflik Laut Cina Selatan, di mana ketegangan regional melibatkan negara-negara dengan kepentingan yang kompleks, ASEAN Way memberikan wadah untuk diplomasi yang berorientasi pada solusi bersama dan perdamaian jangka panjang. Pendekatan ini mewakili komitmen ASEAN untuk mencari penyelesaian yang adil, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak terlibat (Darmawan & Kuncoro, 2019).

Treaty of Amity and Cooperation (TAC) adalah perjanjian multilateral yang dirancang untuk mempromosikan hubungan persahabatan, kerjasama, dan perdamaian antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini pertama kali diusulkan oleh Indonesia dan kemudian diadopsi oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tanggal 24 Februari 1976. TAC berfungsi sebagai kerangka kerja hukum untuk membentuk landasan hubungan antar negara-negara ASEAN dan dengan negara-negara di luar kawasan. Beberapa prinsip kunci yang terkandung dalam TAC melibatkan penyelesaian damai sengketa, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, serta menghindari campur tangan dalam urusan dalam negeri negara anggota. Selain itu, TAC juga mencakup komitmen untuk saling membantu dalam semangat kebijaksanaan dan konsultasi dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama. Hal ini menciptakan kerangka kerja untuk kerjasama regional yang lebih erat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. TAC tidak hanya terbuka untuk negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga untuk negara-negara di luar kawasan yang bersedia bergabung dan setuju untuk mematuhi prinsip-prinsip dan tujuan perjanjian ini. Oleh karena itu, TAC menjadi instrumen penting dalam membangun dan memelihara stabilitas di kawasan Asia Tenggara serta memperkuat kerjasama regional (Ariansah et al., 2023).

TAC memainkan peran krusial dalam menangani konflik di Laut Cina Selatan melalui prinsip-prinsip dan kerangka kerja yang terkandung dalam perjanjian ini. Salah satu poin utama adalah penekanan pada penyelesaian damai sengketa, yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan mendorong negara-negara yang terlibat untuk mencari solusi damai tanpa konfrontasi militer. TAC juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara, memberikan dasar untuk

mengatasi perselisihan terkait kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan. Selain itu, mekanisme konsultasi dan semangat kebijaksanaan bersama yang disediakan oleh TAC memberikan platform untuk dialog terbuka dan konstruktif, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan menemukan solusi yang dapat diterima. Pada tingkat regional, TAC menciptakan kerangka kerja untuk kerjasama lintas berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun hubungan positif antara negara-negara di kawasan. Dengan memberdayakan negara-negara anggota melalui dukungan dan mekanisme konsultasi, TAC juga menjadi alat untuk menciptakan strategi bersama dan pendekatan koordinatif dalam menangani konflik Laut Cina Selatan. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam mediasi TAC memberikan landasan yang kuat untuk mempromosikan dialog, kerjasama, dan penyelesaian damai dalam menangani konflik di Laut Cina Selatan (Kusumah, 2018).

SIMPULAN

Kompleksitas konflik yang berkepanjangan di Laut Cina Selatan, terutama terkait klaim wilayah dan sumber daya alam. Kawasan ini menjadi pusat perhatian internasional karena perselisihan antara Cina dan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Konflik tersebut memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada dimensi politik dan keamanan, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di Asia Tenggara. Dampak konflik mencakup peningkatan anggaran pertahanan, eskalasi militer, kerusakan infrastruktur sipil, dan ancaman terhadap keamanan global. Selain itu, ekonomi negara-negara ASEAN dapat terpengaruh oleh gangguan jalur perdagangan laut, penurunan kepercayaan investor, dan peningkatan anggaran keamanan. Ketidakpastian ekonomi juga dapat memengaruhi sektor pariwisata dan harga energi di kawasan. Dalam menghadapi tantangan ini, ASEAN memainkan peran penting melalui diplomasi kolaboratif. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) dan pendekatan ASEAN Way, organisasi ini mencoba menjalankan dialog, negosiasi, dan kerjasama untuk meredakan ketegangan. Diplomasi ini mengandalkan prinsip-prinsip konsensus, dialog, dan non-intervensi untuk mencapai pemahaman bersama dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Treaty of Amity and Cooperation (TAC) menjadi instrumen penting dalam membangun stabilitas di kawasan dengan menekankan penyelesaian damai sengketa. Prinsip-prinsip TAC, seperti menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, menjadi landasan hubungan antarnegara di Asia Tenggara. Penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan memerlukan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait. Diplomasi,

dialog, dan konsultasi menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil, berkelanjutan, dan menjaga perdamaian serta stabilitas regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A., Putra, A. P., Aryadi, A. W., Nabila, N., Ramli, N., Najwa, A., & Sutriani, S. (2023). Pesona Kekayaan Alam : Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, *10*(2), 345.
- Ariansah, F., Malik, F. A., Saphira, M., Erviana, V., & Antoni, H. (2023). Konflik antara China dengan Vietnam atas Laut China Selatan Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Internasional. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *6*(2), 518. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.518-528>
- Aulawi, M. H., & Edwina, Y. A. (2023). Sengketa Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. *Mimbar Keadilan*, *16*(1), 1–14. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.6967>
- Darmawan, A. B., & Kuncoro, H. R. (2019). Penggunaan ASEAN Way dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan? *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, *8*(1), 43. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019>
- Djuyandi, Y., Illahi, A. Q., & Aurel, A. C. H. (2021). Konflik Laut China Selatan Serta Dampaknya Atas Hubungan Sipil Militer Di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, *5*(1), 112. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.112-124>
- DW. (2023). *Konfrontasi Laut Cina Selatan Picu Konflik Cina-Filipina*. <https://www.dw.com/id/konfrontasi-laut-cina-selatan-picu-konflik-hubungan-cina-filipina/a-66478540>
- Georgetown. (2018). *Dampak Lingkungan dari Konflik Laut Cina Selatan: Bersaing untuk Dominasi Regional dengan Mengorbankan Lingkungan*. <https://www.law.georgetown.edu/environmental-law-review/blog/environmental-ramifications-of-the-south-china-sea-conflict-vying-for-regional-dominance-at-the-environments-expense/>
- Kusumah, R. W. P. I. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, *7*(2), 255–268. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15610>

- Muhamad, S. V. (2020). Eskalasi Ketegangan di Laut China Selatan dan Sikap ASEAN. *Info Singkat*, 12(10), 7–12.
- Mujiono, D. I., & Alexandra, S. (2019). *Multi Track Diplomacy: Teori Dan Studi Kasus*. [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5247/Multy Track Diplomacy.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5247/Multy%20Track%20Diplomacy.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 126. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4404>
- Rimapradesi, Y., Nasution, S. N., Ahmad, S. T. M., & Fadel Muhammad. (2023). Sikap Indonesia Terhadap Krisis China Dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 42–46. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11610>
- Sahasrad, H. (2015). Konflik Laut China Selatan: Rivalitas China-AS dan ASEAN. *Jurnal Konfrontasi*, 34–45.
- Sendow, A. M. (2023). Dampak Hukum Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Perdagangan Lintas Batas Menurut Hukum Laut Internasional. *Lex Privatum*, 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46868%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46868/41828>
- Sitompul, M. A. (2022). Analisis Peran ASEAN Regional Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.51747/publicio.v4i1.695>
- Wahyu Setyo Adi, D. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional Analysis Of Settlement Of South China Sea Disputes By The International Arbitration Agency. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 39–51. <https://jhlg.rewangrencang.com/>